BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terletak di kawasan Cincin Api Pasifik yang secara geografis mempunyai tantangan untuk melindungi dan memperkuat masyarakat dari ancaman risiko bencana. Pergerakan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo Australia di bagian selatan, lempeng Samudera Pasifik di sebelah timur, lempeng Eurasia di sebelah utara (dimana disebagian besar wilayah Indonesia) dan disertai daerah aliran sungai (5.590 DAS) mengakibatkan risiko bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api (129 gunung api aktif) maupun gerakan tanah/ longsor (BNPB:2018).

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Hal ini sangat merugikan dan dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian penduduk yang bergantung pada daerah wisata, serta menurunnya perekonomian daerah-daerah sekitar yang juga bergantung pada sektor pariwisata di kawasan tersebut.

Catatan sejarah tsunami di Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam kurun waktu antara 1600-2012. Berdasarkan sumber pembangkitnya diketahui bahwa 90% dari tsunami tersebut disebabkan oleh aktivitas gempa bumi tektonik, 9% akibat aktivitas vulkanik dan 1% oleh tanah longsor yang terjadi dalam tubuh air (danau atau laut) maupun longsoran dari darat yang masuk ke dalam tubuh air (BNPB: 2012).

Selama dua dekade terakhir terjadi sedikitnya sepuluh kejadian bencana tsunami di Indonesia. Sembilan diantaranya merupakan tsunami yang merusak dan menimbulkan korban jiwa serta material, yaitu tsunami di Flores (1992); Banyuwangi, Jawa Timur (1994); Biak (1996); Maluku (1998); Banggai, Sulawesi Utara (2000); Aceh (2004); Nias (2005); Jawa Barat (2006); Bengkulu (2007); dan Mentawai (2010). Dampak yang ditimbulkan tsunami tersebut adalah sekitar 170 ribu orang meninggal. Daerah dengan ancaman tsunami yang sangat tinggi tersebar pada hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pantai barat Pulau Sumatera, selatan Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian tengah dan utara, Maluku dan Maluku utara serta Papua bagian barat dan utara (BNPB: 2012).

Tabel 1.1 Kejadian Tsunami yang Merusak Tahun 1990-2010

No	Tanggal	Mag. Gempa (SR)	Pusat Gempa	Waktu Tiba (menit)	Lokasi	Tinggi Gelombang (meter)	Korban Jiwa
1.	12/12/1992	7,8	Laut Flores	12	Alor	26,2	2500
2.	3/6/1994	7,8	Jawa	38	Banyuwangi	13,9	238
3.	18/2/1996	8,2	Biak dan Irian Jaya	20	Biak	7,68	110
4.	29/11/1998	7,7	P.Tallabu ,Maluku	18	Tallabu	2,75	18
5.	4/5/2000	7,6	Banggal, Sulawesi	35	Banggal	6,0	4
6.	26/12/2004	9,0	Barat Laut Sumatra	33	Meulaboh	50,9	165000
7.	28/3/2005	8,7	Barat Laut Sumatra	43	Padang Sidempuan	3,0	800
8.	17/7/2006	7,7	Pengandaran, Jawa	42	Pangandaran	10,0	200
9.	12/9/2007	8,4	Bengkulu	35	Bengkulu	0,9	25
10.	25/10/2010	7,2	Mentawai	10	Mentawai	8,0	413

Sumber: BNPB 2012

Selat Sunda terletak pada kawasan transisi antara segmen Sumatera dan segmen Jawa dari Busur Sunda, yang juga merupakan daerah di Indonesia yang sangat aktif dalam hal aktivitas vulkanik, kegempaan dan pergerakan tektonik

vertikal. Letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 terjadi di tengah Selat Sunda dan memicu tsunami di pesisir Lampung bagian selatan serta bagian utara, selatan, dan barat Banten. Sementara itu, dalam hal zona penunjaman di selatan Pulau Jawa, segmen Jawa dari Busur Sunda yang memanjang dari Selat Sunda sampai Cekungan Bali di Timur. Tercatat tiga gempa bumi besar terjadi di zona ini pada tahun 1840, 1867, dan 1875. Dalam tiga ratus tahun terakhir belum ada gempa bumi Megathrust dengan skala sebesar gempa bumi tahun 1833 dan 1861 di Sumatra yang terjadi di kawasan ini (BNPB:2012).

Kecamatan Bayah berada di pesisir selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Pesisir Bayah yang terdiri dari empat desa yaitu Desa Sawarna, Desa Bayah Barat, Desa Damasari, dan Desa Sawarna Timur. Daerah Pesisir Bayah merupakan lokasi yang sarat akan potensi wisatanya, sehingga banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang mengunjungi pantai-pantai di Bayah. Banyaknya wisatawan dan penduduk yang tinggal di sana sehingga membuat Pesisir Bayah harus memiliki kapasitas daerah yang tinggi disebabkan bahaya tsunami yang mengintai Pesisir Bayah juga tinggi.

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Selain itu kapasitas daerah juga harus melihat kepada tatanan pada skala internasional. Komprehensivitas dasar acuan untuk kapasitas daerah diharapkan dapat memberikan arah kebijakan pembangunan kapasitas daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. (Peraturan Kepala BNPB No 3:2012)

Dalam menghitung risiko bencana sebuah daerah melibatkan aspek ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*capacity*). Risiko akan berbanding lurus dengan kerentanan dan ancaman, dan berbanding terbalik dengan kapasitas. Untuk menurunkan risiko adalah dengan cara meningkatkan kapasitas. Dengan kata lain, meningkatnya kapasitas akan dapat menurunkan risiko. Dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 tahun 2012 telah ditetapkan bagaimana mengukur dan meningkatkan kapasitas daerah yang menekankan aspek aspek kebijakan, kesiapsiagaan, dan peran lembaga terkait.

Kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia masih perlu diperkuat. Kekuatan-kekuatan dan daya tahan yang ada di masyarakat harus terus diidentifikasi dan dikembangkan. Nilai-nilai budaya yang mengakar dimasyarakat perlu terus digali dan ditumbuhkembangkan sebagai kekuatan modal sosial yang akan mendukung pencapaian masyarakat tangguh terhadap bencana. Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai maka perkuatan kemampuan bangsa kita dalam menghadapi bencana akan merupakan suatu kenyataan dan bencana dapat kita tekan baik jumlah maupun dampak yang ditimbulkannya (Maarif : 2012)

Manajemen bencana seringkali hanya sebatas respon-respon reaktif jangka pendek dan kurang berorientasi pada tindakan proaktif kesiapsiagaan serta upaya mitigasi jangka panjang. Pada skala internasional, Kerangka Aksi Hyogo (selanjutnya disebut KAH) dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dasar pembangunan kapasitas. KAH merupakan kesepakatan lebih dari 160 negara untuk mengarisutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyepakati KAH, meratifikasi KAH ini dalam Sistem Penanggulangan Bencana Nasional. Beberapa wujud ratifikasi Kerangka Aksi Hyogo ini adalah Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan lainnya. Konferensi Dunia tentang Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada tahun

2005 menghasilkan “Kerangka Aksi Hyogo” 2005-2015, yang menekankan bahwa berbagai upaya untuk mengurangi risiko bencana seyogyanya terintegrasi secara sistematis dalam kebijaksanaan, perencanaan, dan program bagi pembangunan berkesinambungan dan pengurangan kemiskinan. Konferensi tersebut mengadopsi 5 prioritas tindakan sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana ditempatkan sebagai prioritas nasional dan lokal dengan dasar institusional yang kuat dalam pelaksanaannya.
2. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan pemanfaatan peringatan dini.
3. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan.
4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar.
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana dengan respon yang efektif pada semua tingkatan (ISDR: 2005).

Salah satu prioritas tindakan dalam Kerangka Aksi Hyogo adalah tentang ketahanan bencana. Untuk meminimalisir terjadinya korban baik jiwa ataupun harta benda maka diperlukan masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap potensi bencana di daerah yang rawan bencana terutama bencana tsunami. Berbekal latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kapasitas Daerah Pesisir Bayah Dalam Menghadapi Bencana Tsunami.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kapasitas daerah Pesisir Bayah dalam menghadapi bencana tsunami yang dapat terjadi sewaktu-waktu?

2. Bagaimana kondisi parameter-parameter dari kapasitas daerah Pesisir Bayah?
3. Apakah kapasitas daerah Pesisir Bayah telah cukup untuk mengurangi dampak negatif dari bencana tsunami yang dapat terjadi?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini hanya membatasi pada masalah tentang Kapasitas Pesisir Bayah Dalam Menghadapi Bencana Tsunami. Penelitian ini mengadopsi 4 dari 5 prioritas program dari Kerangka Aksi Hyogo diantaranya peringatan dini dan kajian risiko bencana, pendidikan kebencanaan, pengurangan faktor-faktor risiko dasar, dan kesiapsiagaan pada seluruh lini.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan di atas maka masalah yang akan diteliti adalah, “Bagaimana kapasitas Pesisir Bayah dalam menghadapi bencana tsunami?”

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis pada ilmu manajemen bencana berupa kapasitas daerah dalam menghadapi bencana tsunami.

2. Manfaat praktis

A. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan perbandingan pembaca yang sedang mengadakan penelitian.

B. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam hal manajemen bencana untuk mengambil suatu kebijakan.